

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

Boedi Harsono. Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan, 2007.

Frida Husni Hasbullah. Hukum Kebendaan Perdata : Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan. Jakarta : Ind-Hill Co, 2002

Hasni. Hukum Penataan Ruang Dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks Uupa-Uupr-Uuplh. Jakarta : PT. Rajagrafindo persada, 2008.

Ida Nurlindam. Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria : Perspektif Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2009

Kartini Muljadi Dan Gunawan Widjaja. Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008.

Sudarsono. Kamus Hukum : Edisi Baru, Cetakan Kelima. Jakarta : PT. Rineka Citra, 2007.

Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2005.

### **Peraturan Perundang-undangan :**

Indonesia. Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. UU Nomor 5 Tahun 1960, Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043.

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. UU Nomor 4 Tahun 1996, Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3632.

\_\_\_\_\_. Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara. UU Nomor 1 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris. UU Nomor 30 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Tentang Pemerintah Daerah. UU Nomor 32 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355.

- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. UU Nomor 33 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah. PP Nomor 40 Tahun 1996, Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pendaftaran Tanah. PP Nomor 24 Tahun 1997, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi. PP Nomor 25 Tahun 2000, Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. PP Nomor 6 Tahun 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Tata Cara Permohonan Dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya. Permen Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977
- \_\_\_\_\_. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Permen Agraria/Kepala BPHN Nomor 3 Tahun 1997
- \_\_\_\_\_. Peraturan Menteri Keuangan Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Negara. Permen Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007